

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki heterogenitas demikian kompleks, terdiri dari ribuan pulau dan keberagaman suku bangsa yang membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya. Perbedaan latar belakang kelompok masyarakat, melahirkan nilai norma, adat, budaya, dan perilaku politik, yang berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan dalam hal ini mengarah kepada ke-khasan suatu daerah yang menggambarkan jadi diri dari kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai suatu kesatuan. Individu-individu yang di dalamnya terdapat cita-cita luhur yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut. Dalam usaha mencapai cita-cita luhur tersebut maka dibuatlah suatu nilai norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kegiatan bersama dan ditegakkan dalam kehidupan sosial.

Indonesia sebagai negara yang mengaplikasikan sistem demokrasi maka mengharuskan adanya partisipasi politik dari setiap warga negara. Partisipasi politik seringkali menjadi indikator adanya modernisasi politik di suatu wilayah. Partisipasi politik meliputi kajian perilaku, persepsi, dan sikap terhadap sistem politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Budiardjo, 2008:368) dalam karya penelitiannya dengan judul “ *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* “ mengatakan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuata keputusan oleh

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal efektif atau tidak efektif. (By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective)”

Atas dasar itu, manusia sebagai makhluk sosial dan politik tentu saja dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari urusan politik, dan kehidupan politik menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat dalam hubungan interaksi antar anggota masyarakat maupun interaksi dengan pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Interaksi yang terinternalisasi menjadi berbagai macam bentuk pandangan, sikap, dan pengetahuan yang tercermin dalam partisipasi politik masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem politik. Asumsi dasarnya adalah tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka menggambarkan bahwa masyarakat memahami proses kenegaraan serta melibatkan diri dalam proses tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat rendah maka menggambarkan bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran serta minat terhadap proses atau permasalahan negara.

Nilai norma, budaya, adat istiadat, pengetahuan politik, serta pandangan politik suatu kelompok masyarakat dalam hubungannya dengan politik dapat dikaji dengan pendekatan budaya politik yang merupakan bagian integral dari kajian disiplin ilmu politik. Budaya politik merupakan tatanan nilai, budaya, dan religiusitas yang membentuk orientasi politik suatu kelompok masyarakat. Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam Anggara (2013:109) mengartikan budaya politik

adalah sikap orientasi khusus masyarakat sebagai warga negara pada sistem politik yang berlaku, sikap terhadap hak dan kewajiban warga negara pada sistem politik.

Selanjutnya Almond dan Verba dalam kaitanya dengan sikap orientasi menjelaskan budaya politik memiliki tiga orientasi budaya politik, yaitu

1. Orientasi kognitif, berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan output.
2. Orientasi afektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilanya.
3. Orientasi evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan (Anggara, 2013:112).

Ruang lingkup kajian budaya politik meliputi permasalahan legitimasi, kontrol kekuasaan, kebijakan pemerintah, partai politik, perilaku politik pejabat negara, respon masyarakat pada kekuasaan pemerintah. Serta budaya politik juga meliputi religius masyarakat, ekonomi masyarakat, dan kehidupan individu baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial anggota masyarakat (Anggara, 2013:112). Gabriel Almond dan Sidney Verba membagi klasifikasi dari budaya politik kedalam empat tipe budaya politik sebagai berikut.

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasinya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif.
2. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju baik secara sosial maupun ekonomi, tetapi masih pasif.

3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
4. Budaya politik campuran (mixed political cultures) yaitu gabungan kakarakteristik tipe-tipe kebudayaan politik murni yang diuraikan diatas.
(Anggara, 2013:115-116).

Sedangkan Clifford Geerts dalam Anggara (2013:116) mengklasifikasikan budaya politik di masyarakat Indonesia dalam tiga tipe budaya politik, yaitu budaya politik Abangan, budaya politik Santri, dan budaya politik Priyayi.

Kajian partisipasi politik erat kaitannya dengan kajian budaya politik suatu daerah. Pada dasarnya kajian budaya politik adalah unsur yang membentuk partisipasi politik, oleh karena itu budaya politik menjadi faktor internal yang mempengaruhi tingkatan partisipasi politik. hal disebabkan karena budaya politik adalah nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sejak dulu sampai dengan sekarang, yang menciptakan kecenderungan masyarakat untuk masih peduli pada kegiatan-kegiatan kenegaraan atau politik, seperti pemilihan umum, mengutarakan aspirasi, melakukan kritik dan evaluasi terhadap kebijakan politik negara, dan kegiatan politik lainnya.

Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Cabang Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap merupakan asosiasi masyarakat penganut kepercayaan kepada tuhan yang maha esa di Desa Pesanggrahan. Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Cabang Desa Pesanggrahan memiliki jumlah anggota sebanyak 1200 orang yang tersebar dalam dua dusun, yaitu Dusun Pesanggrahan dan Dusun Dukuh. Dengan keanggotaan yang begitu besar dan menjadi perserikat mayoritas penganut

kepercayaan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tentu saja Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah memainkan peranan penting dalam mengagregasikan tuntutan dari anggotanya kepada masyarakat, serta menggambarkan relasi antara anggota paguyuban sebagai warga negara dengan negara yang tercermin pada partisipasi politik.

Anggota Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah di Desa Pesanggrahan merupakan etnis Jawa asli yang masih mengaplikasikan kebudayaan Jawa (Kejawen) dengan sistem masyarakat yang hirarkis dan kekuasaannya bersifat nyata, konstan, dan bersumber dari satu sumber yaitu trah atau keturunan. Kekuasaan yang bersumber dari satu sumber menciptakan kuatnya pengaruh pemimpin. Selain itu Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah menjadi wadah bagi anggotanya dalam mengaktualisasikan paham kepercayaan kepada tuhan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi nyekar atau ziarah kuburan yang dibarengi dengan ritual keagamaan yang berdasakan kepada ajaran turun temurun dari leluhur mereka, tradisi nyirih yaitu tradisi yang dilaksanakan di bulan ramadhan, dimana nyirih hampir sama dengan puasa umat islam pada umumnya namun dalam tradisi nyirih dalam berpuasa diperbolehkan merokok. Selain itu anggota Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah tidak menjalan shalat layaknya umat islam pada umumnya, melainkan diganti dengan sembahyang kepada tuhan yang maha esa yang dilakukan ketika tradisi nyekar, walaupun para anggota Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah mengaku dirinya sebagai seorang yang beragama islam.

Praktik ajaran penganut kepercayaan itu seringkali menghadirkan praktik eksklusif sosial atau marginalisasi sosial pada pengahayat kepercayaan turut

menciptakan suatu budaya politik yang berkembang dalam penghayat kepercayaan. Menurut Muttaqin (2016) eksklusi sosial yang terjadi pada penghayat kepercayaan di Kabupaten Cilacap diantaranya *pertama*, persoalan administrasi kenegaraan, dimana muncul kekhawatiran dari masyarakat penghayat kepercayaan ketika mereka mengadministrasikan kependudukan sesuai kepercayaan mereka, dikhawatirkan dapat membuat terbatasnya pelayanan publik yang didapatkan. Kekhawatiran disebabkan oleh karena masih terbatasnya lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengurus penghayat kepercayaan, sebagai contohnya guru agama di sekolah-sekolah hanya disediakan bagi agama-agama resmi di Indonesia, sedangkan bagi ajaran kepercayaan tidak disediakan. *Kedua*, adanya persepsi dari sebagian masyarakat yang menstigmakan penganut kepercayaan sebagai golongan patologis pada keagamaan, dengan menganggap golongan penghayat kepercayaan sebagai golongan yang aneh dan menyimpang dari keagamaan pada umumnya, yang kemudian berlanjut pada ucapan musyrik, takhayul, dan magis, dll. *Ketiga*, pada pandangan keagamaan yang bersifat purifikasi, golongan penganut kepercayaan diklasifikasikan sebagai golongan manusia yang tidak sempurna dan hidupnya penuh dosa. *Keempat*, pada satu sisi penganut kepercayaan seringkali dianggap sebagai patologis, namun disisi lainnya kekhasan dari golongan penganut kepercayaan ini, serigkali dikomersialisasikan sebagai objek wisata. Maka dari itu peran perserikat menjadi sentral sebagai sarana menghubungkan negara dan masyarakat umum dengan para penganut kepercayaan.

Seperti yang dikatakan oleh Almond dan Verba (1984:301) bahwa perserikatan atau paguyuban merupakan wadah yang menjadi penengah diantara

individu dengan negara, dimana melalui perserikatan ini individu dapat dengan efektif berhubungan dengan sistem politik. Selain itu perserikat menjadi wadah dapat memberikan pemenuhan kebutuhan dari anggotanya sebelum pemerintah atau negara menyiapkannya. Anggota perserikatan atau paguyuban lebih cenderung menerima hal yang dianggap menguntungkan bagi perserikatannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh budaya politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah sebagai perserikatan sukarela yang bersifat sosial dan semi politik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kuatnya pengaruh pemimpin paguyuban merupakan implikasi dari sistem masyarakat hirarkis dan tersentral pada satu sumber kekuasaan, yang dianut dalam Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah, mungkin berkaitan dengan budaya politik yang berkembang dalam Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat
2. Keanggotaan dalam paguyuban atau perserikatan membentuk suatu budaya politik yang mempengaruhi tingkatan partisipasi politik dari paguyuban tersebut.
3. Adanya perlakuan eksklusi sosial terhadap penganut kepercayaan kepada tuhan yang maha esa di Kabupaten Cilacap, yang juga terjadi kepada anggota Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah, mungkin berkaitan dengan budaya

politik yang berkembang dalam Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan fokus utamanya tidak menyimpang dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran, permasalahan pada peneliti ini terbatas pada budaya politik dan partisipasi politik secara umum dari Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah di Desa Pesanggrahan Kabupaten Cilacap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Budaya Politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Seberapa Besar Pengaruh Budaya Politik Terhadap Partisipasi Politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini, sebagai berikut;

1. Dapat mengklasifikasikan budaya politik yang berkembang di Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui pengaruhnya budaya politik terhadap partisipasi politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga bisa mengerti sifat dan hubungan kebudayaan politik dengan sistem politik yang berlaku, penulis bisa menghargai cara-cara kelompok masyarakat tradisional membawa perubahan sehingga sistem politik dapat lebih demokratis.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap kajian ilmu politik khususnya tentang budaya politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sehingga bisa menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk pembaca dan bisa mengetahui budaya Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pengurus dan anggota Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap mengenai budaya politik Paguyuban Resik Jero Kubur Tengah Kabupaten Cilacap.